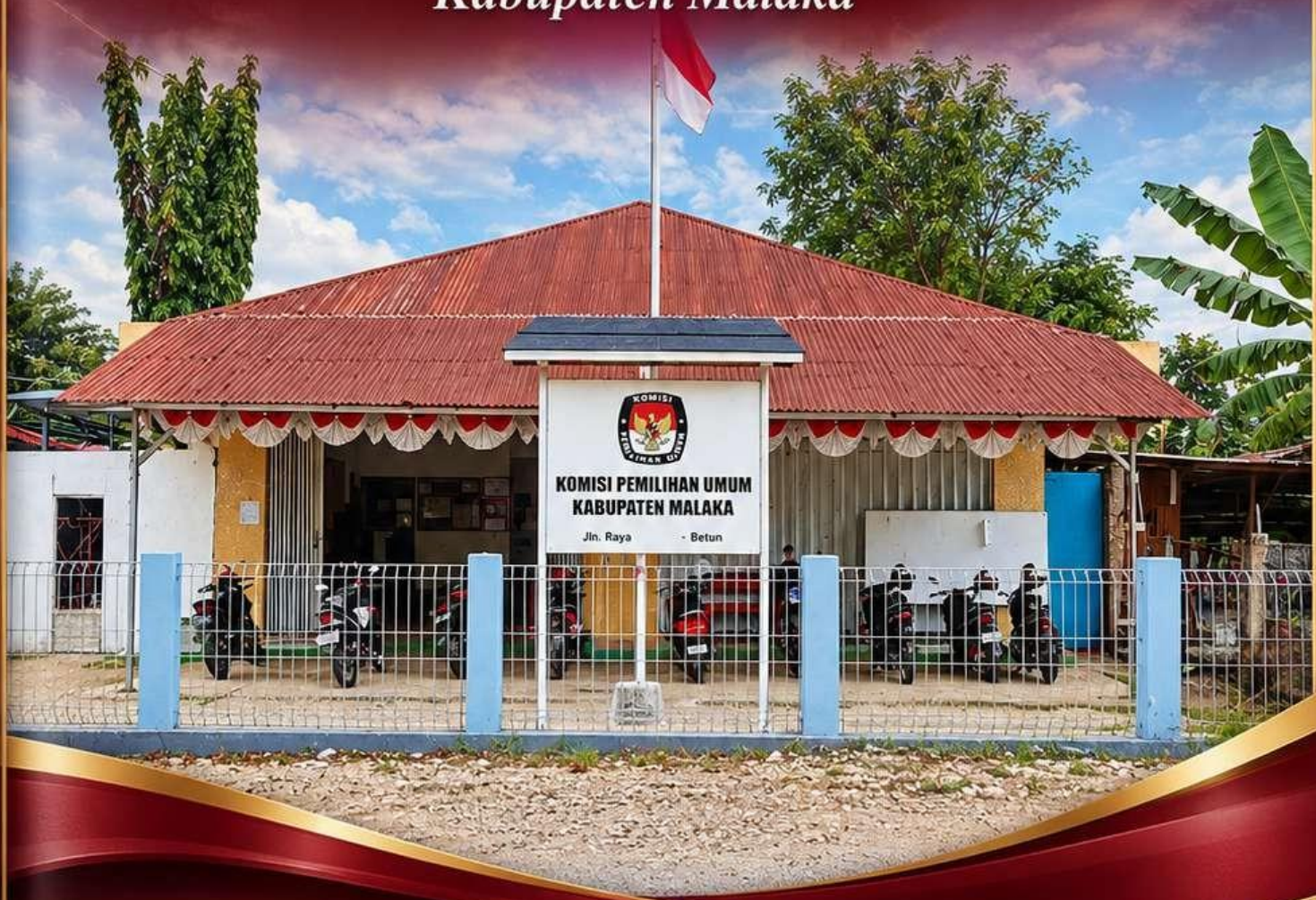
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

JEJAK DEMOKRASI DI MALAKA

Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka



EDISI KHUSUS • SEJARAH KELEMBAGAAN

SEJARAH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MALAKA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka berakar langsung dari dinamika pemekaran wilayah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, pembentukan KPU Malaka terjadi setelah Kabupaten Malaka resmi mekar dari Kabupaten Belu pada tahun 2012/2013.

A. Kronologi Pembentukan dan Tonggak Sejarah

Periode/Tahun	Peristiwa dan Tonggak Sejarah
2012-2013	**Latar Belakang Pemekaran:** DPR RI mengesahkan pembentukan Kabupaten Malaka pada 14 Desember 2012, yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Sebagai wilayah administrasi baru yang mencakup 12 kecamatan di hamparan dataran Malaka, kebutuhan akan adanya lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri menjadi prioritas utama demi tegaknya instrumen kedaulatan rakyat. Pada masa transisi sepanjang tahun 2013, segala urusan pemutakhiran data pemilih awal, pemetaan wilayah, dan logistik kepemiluan masih dikendalikan di bawah supervisi bersama antara KPU Kabupaten Belu bersama KPU Provinsi NTT.
2014	**Penyelenggaraan Pemilu Pertama:** KPU Kabupaten Malaka dibentuk secara mandiri untuk mengawal jalannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 di wilayah administrasi baru tersebut. Adapun **aribut tantangan** yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Malaka pada masa awal pembentukannya, yakni • **Tantangan Infrastruktur Darurat**: KPU Malaka mengawali operasionalnya dari kantor sementara dengan status sewa atau pinjam pakai di Kota Betun, di mana fasilitas teknologi, jaringan internet, dan gudang penyimpanan logistik pemilu masih sangat terbatas. • **Tantangan Penyediaan Personel**: Struktur sekretariat pada gelombang pertama harus mengandalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan (*seconded*) secara bertahap dari Pemkab Belu dan Pemkab Malaka guna menjalankan fungsi administrasi teknis. • **Tantangan Penataan Daerah Pemilihan**: Lembaga harus merancang dan memetakan Daerah Pemilihan (Dapil) baru yang mandiri untuk pertama kalinya demi memperebutkan 25 kursi anggota DPRD Kabupaten Malaka pada periode perdana.

2015	**Pilkada Perdana Kabupaten Malaka:** KPU Kabupaten Malaka mencatat sejarah besar dengan sukses menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Malaka defenitif pertama (pemenangnya adalah pasangan Stefanus Bria Seran dan Daniel Asa).
2020	**Pilkada di Masa Pandemi:** KPU Kabupaten Malaka menyelenggarakan Pilkada Malaka kedua di tengah tantangan pandemi COVID-19, yang melahirkan kepemimpinan Bupati Simon Nahak dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin.
2024-Skrng	**Konsolidasi Demokrasi Serentak:** Di bawah kepengurusan Komisioner periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Yuventus A. Bere, KPU Kabupaten Malaka bertanggung jawab penuh menggelar Pemilu Serentak serta proses Pilkada secara berkelanjutan. Secara geografis, Kabupaten Malaka memiliki posisi strategis karena berbatasan darat langsung dengan negara **Timor Leste** melalui area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin. Posisi ini memberikan tanggung jawab historis yang besar bagi KPU Malaka untuk terus menjaga validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi warga di area tapal batas negara agar hak pilih mereka tidak hilang. Hingga saat ini pada tahun **2026**, KPU Kabupaten Malaka terus berfokus pada langkah-langkah modernisasi, antara lain: • **Digitalisasi Administrasi:** Mengadopsi penuh sistem informasi berbasis digital terintegrasi, seperti aplikasi *Sirekap*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna transparansi publik. • **Pendidikan Pemilih Berkelanjutan:** Gencarnya program penguatan partisipasi masyarakat, seperti program *"KPU Mengajar"* yang secara konsisten dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan lokal (salah satunya di **STKIP Sinar Pancasila Betun** pada Oktober 2026) untuk menekan angka golput pada pemilih pemula.

B. Fokus Perkembangan Lembaga

1. **Penguatan Regulasi & Pemutakhiran Data:** Memastikan validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah perbatasan negara.
2. **Pendidikan Pemilih (Parmas):** Menggalakkan program sosialisasi guna menekan angka golput dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal.

3. **Kemandirian Infrastruktur:** Secara bertahap membangun tata kelola sekretariat yang mandiri di ibu kota kabupaten, Kota Betun, guna mendukung pelayanan kepemiluan yang transparan.

C. RIWAYAT JABATAN KOMISIONER KPU KABUPATEN MALAKA

- Periode Transisi (Mei - November 2015)

  Penanggung Jawab penuh diambil alih sementara oleh KPU Provinsi NTT

  - **Ketua:** Johanes Depa
  - **Anggota (Divisi / Komisioner):**
    - Lay Djaranjoera
    - Gasim
    - Yosafat Koli
    - Maryanti H. Luturmas-Adoe

- Periode Definitif Perdana (2015 - 2020)
  - **Ketua:** Yeremias C. Kurniawan
  - **Anggota (Komisioner):**
    - Yoseph Ruang
    - Yosef Nahak
    - Makarius Bere Nahak
    - Piter Natonis (Alm. – Wafat saat menjabat aktif pada September 2017)
    - Emanuel Adipapa, S.H. (Anggota PAW – Dilantik Resmi Juli 2018 menggantikan posisi almarhum Piter Natonis)

- Periode Kedua (2019 - 2024)
  - **Ketua:** Makarius Bere Nahak (Komisioner Awal / Ketua – Kemudian digantikan oleh **Bartimeus Nahak** melalui mekanisme PAW pada Juni 2023)
  - **Anggota (Komisioner):**
    - Yoseph Ruang
    - Yosef Nahak (Komisioner Awal – Kemudian digantikan oleh **Dionisius Berek** melalui mekanisme PAW pada Juni 2023)

    - Yuventus A. Bere
    - Stefanus Manhitu

- Periode Ketiga Aktif (2024–Sekarang)
  - **Ketua:** Yuventus A. Bere (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik)
  - **Anggota (Komisioner):**
    - Stefanus Manhitu (Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Hukum)
    - Kristoforus A. Kali (Divisi Data dan Informasi)
    - Fransiskus X.S. Meo (Divisi Hukum & Pengawasan)
    - Ibrahim Laga (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas & SDM)

D. RIWAYAT JABATAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MALAKA

Sekretaris KPU Kabupaten Malaka dari Masa ke Masa berdasarkan catatan sejarah transisi administrasi.

- Tahun 2016: Theresia Hoar Nahak (Peletak batu pertama penataan tata usaha dan aset administratif pasca-Pilkada 2015);
- Tahun 2016: Yustinus R. Klau (Melanjutkan estafet konsolidasi internal Aparatur Sipil Negara di masa transisi);
- Tahun 2023–Sekarang: Marsel D.I. Taneo (Sekretaris KPU Kabupaten Malaka aktif).